

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI PUBLIK, DAN
INVESTASI SWASTA TERHADAP IMPLEMENTASI OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

LUTHFI CHALIS SHIRAATH

18060113

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI PUBLIK, DAN INVESTASI
SWASTA TERHADAP IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Luthfi Chalis Shiraath
BP/NIM : 2018/18060113
Keahlian : Ekonomi Publik
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2023

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi



Dr. Novva Zulfa Riani, S.E., M.Si
NIP. 1971104 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Pembimbing



Dr. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI PUBLIK, DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Luthfi Chalis Shiraath
NIM/TM : 18060113/2018
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Drs. Ali Anis, M.S	1. 
2	Anggota	: Dr. Novya Zulfa Riani, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	: Urmatul Uska Akbar, SE, ME	3. 

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luthfi Chalis Shiraath
NIM/Th. Masuk : 18060113/2018
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 07 Februari 1999
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Raudhah III Blok G No. 13, Kp. Olo, Nanggalo, Padang,
Sumatera Barat
No. Hp/Telephone : 081993322370
Judul Skripsi : Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, dan
Investasi Swasta Terhadap Implementasi Otonomi Daerah
di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali tertulis jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan kepala departemen program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran didalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Januari, 2023



Luthfi Chalis Shiraath
NIM. 18060113

ABSTRAK

Luthfi Chalis Shiraath (18060113) : Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, dan Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Ali Anis, MS.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: (1) Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (2) Sejauhmana pengaruh investasi publik terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (3) Sejauhmana pengaruh investasi swasta terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (4) Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal, investasi publik, dan investasi swasta terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan induktif. Data yang digunakan adalah data panel untuk 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2013-2021, data diperoleh dari lembaga terkait dengan variabel penelitian yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel terikat yang pada penelitian ini adalah implementasi otonomi daerah dan variabel bebas yang terdiri dari desentralisasi fiskal, investasi publik, investasi swasta. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Moden* (REM).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (2) Investasi publik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (3) Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (4) Desentralisasi fiskal, investasi publik, dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, Investasi Swasta, Dan Otonomi Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Merupakan suatu anugerah yang tak ternilai bagi penulis bisa memperoleh ilmu dan berkesempatan menerapkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, Dan Investasi Swasta Terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang. Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak diberi nasehat, motivasi, arahan dan bimbingan oleh berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Kepala Departement Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Joan Marta, SE, M.Si selaku Sekretaris Departement Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen

- Pembimbing yang telah memberikan banyak pelajaran, motivasi, kritik dan saran yang sangat berharga bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku penguji I yang telah memberikan ilmu, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Ibu Urmatul Uska Akbar, SE, ME selaku penguji II yang telah memberikan ilmu, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Departement Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu mengenai soft skill, bantuan moral dan material sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
 8. Kak Lidya selaku Admin Departement Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah memudahkan saya dalam mencari sumber referensi dalam pembuatan skripsi ini.
 10. Teristimewa dan terhormat kepada kedua Orang Tua penulis yang paling penulis cintai dan penulis sayangi yaitu Ayah Drs. Hilman Satria, MA dan Ibu Vera Rajendra, S.Pi. Penulis berterimakasih kepada kedua Orang tua yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga serta do'a, dukungan, semangat, motivasi yang diberikan orang tua penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
 11. Terimakasih kepada Ilmi Marina sebagai penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta terimakasih sudah selalu ada dan selalu sabar menghadapi penulis dalam membuat skripsi ini, dan telah membantu penulis

- sebagai *support system* baik didalam kampus maupun diluar kampus, yang mana saling bertukar cerita dan pikiran sedih maupun senang.
12. Sahabat semasa SMP hingga sekarang yaitu, Abi, Irvand, Ikhlas, Luhur, Melisa, Vania, Meysha dan Sulthan yang terus memberikan dorongan semangat diberikan mereka kepada penulis hingga tersusunnya skripsi ini.
 13. Sahabat semasa SMA, yaitu Pariz, Arip yang terus memberikan semangat dan menemani penulis ketika sedang suntuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
 14. Sahabat-sahabat seperjuangan dari awal kuliah yaitu, Hafizh, Rama, Fadli yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta masukannya selama penulis membuat skripsi ini.
 15. Teman-teman seperjuangan dan sepebimbangan Ami, Puja, dan Eri yang memberikan dukungan dan perhatiannya kepada penulis, serta berjuang Bersama-sama dalam berbagai masalah baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
 16. Seluruh kawan-kawan konsentrasi Ekonomi Publik di angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan do'a dan semangat hingga selesainya skripsi ini.
 17. Rekan-rekan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018 dan senior serta junior Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah bersedia membantu memberikan semangat, serta motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 19. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan kebaikan bagi kita semua.

Padang, Oktober 2022

Penulis,

Luthfi Chalis Shiraath

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	13
BAB 2 KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	15
1. Otonomi Daerah.....	15
2. Desentralisasi Fiskal Dan Implementasi Otonomi Daerah	21
3. Investasi Publik dan Implementasi Otonomi Daerah.....	31
4. Investasi Swasta Dan Implementasi Otonomi Daerah.....	35
B. Peneltian Terdahulu.....	41
C. Kerangka Konsep Penelitian	44
D. Hipotesis	45
BAB 3 METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Jeenis dan Sumber Data Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Definisi Operasional.....	47

F. Teknik Analisis Data	48
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	58
B. Pembahasan	75
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2021.....	4
Tabel 1.2 Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2021	7
Grafik 1.2 Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2021	9
Grafik 1.4 Perkembangan Investasi Swasta Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2021	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 4.1 Perkembangan Implementasi Otonomi Daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 - 2021	60
Tabel 4.2 Perkembangan Desentralisasi Fiskal di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 - 2021	62
Tabel 4.3 Perkembangan Investasi Publik di Kab/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 - 2021	64
Tabel 4.4 Perkembangan investasi Swasta di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 - 2021	66
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausmann	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Langrange Multiplier.....	69
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Random Effect Model.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Keseimbangan Depresiasi	37
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	44

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru, pertanyaan dan tuntutan tentang perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bermunculan, pada akhirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Sejak undang-undang ini berlaku, banyak perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai salah satu contohnya adalah perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pada sistem pemerintahan yang semula berbentuk sentralisasi menjadi desentralisasi, yang berarti adanya pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perubahan sistem pemerintah di Indonesia, ditandai dengan berawalnya masa Reformasi pada tahun 2001 dimana sifat kekuasaan yang sebelumnya terpusat berubah menjadi daerah diberi kewenangan sendiri atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Perubahan ini diharapkan kepada daerah-daerah agar lebih mandiri dalam pembangunan daerahnya sendiri. Otonomi daerah diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dan mengalami perubahan menjadi Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 yang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setelah undang – undang tentang otonomi daerah diberlakukan, daerah otonom akan memiliki sebagian besar kekuasaan atas daerahnya yang terlepas dari pemerintah pusat. Hal ini membuat daerah otonom akan lebih aktif dalam proses pembangunan daerahnya. Dengan sistem ini, pembangunan akan lebih terarah karena Pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan lebih memahami kebutuhan daerahnya sendiri.

Menurut Sakarya (2018) Suatu daerah otonom akan bisa dikatakan mandiri dan mampu bertanggung jawab atas daerahnya adalah ketika daerah tersebut bisa mengurus dan membiayai segala urusan yang ada di daerah tersebut tanpa dengan biayanya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat sebagai pemberi amanah

Secara umum, menurut Kaho (2002) dalam Radiansyah (2019), faktor - faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu:

- a. Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah;
- c. Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; serta
- d. Faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kemampuan mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri daerah otonom adalah kemandirian keuangan, termasuk kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya keuangan dengan baik dan menggunakannya secara bijaksana, wajar dan akurat. Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup untuk membiayai pelaksanaan otonominya.

Namun, pada kenyataannya setelah 20 tahun otonomi daerah berjalan di Indonesia masih banyak daerah yang bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat. Saat ini, isu pokok bukan lagi pada bagaimana menciptakan sistem transfer sehingga sumber dana untuk daerah (terutama daerah miskin) berjumlah relatif cukup memadai dan antara daerah satu dengan lainnya dibuat tidak terlalu timpang. Isu pokok sekarang adalah bagaimana mengarahkan daerah, terutama daerah-daerah yang tidak kaya untuk bisa menggunakan APBD nya secermat mungkin dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hirawan, 2007)

Adapun penelitian ini akan membahas masalah implementasi otonomi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, karena tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, pada dasarnya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) perkapita yang akan mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah dan pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Berikut di sajikan data PDRB Perkapita atas harga berlaku di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat :

Grafik 1.1
Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada Grafik 1.1 dapat dilihat perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita di 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Hal ini menggambarkan kegiatan perekonomian di Sumatera Barat semakin berkembang. Kemajuan perekonomian masing-masing kabupaten/kota tentunya akan meningkatkan PDRB perkapita Sumatera Barat yang dimana menurut data yang diperoleh dari BPS Sumatera Barat, yaitu tertinggi pada tahun 2021 PDRB Perkapita Sumatera Barat sebesar Rp. 45.294 dan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 28.994. PDRB

Perkapita dari tahun 2013 hingga 2019 baik di kawasan regional maupun nasional secara konsisten menunjukkan peningkatan. Namun pada tahun 2020, PDRB Perkapita mengalami penurunan baik secara nasional maupun di Sumatera Barat. Hal ini tentunya tidak lepas dari perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tetapi, PDRB Perkapita kembali meningkat pada tahun 2021 pasca pandemi covid-19.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, menurut prinsip *money should follow functions* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Christia and Ispriyarso 2019). Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, diperlukan keberadaan pemerintahan pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar prinsip *money follows function* dapat dilaksanakan secara konsisten dan eksplisit. Hal ini untuk menghindari terjadinya transfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menjadi tanggung jawab daerah.

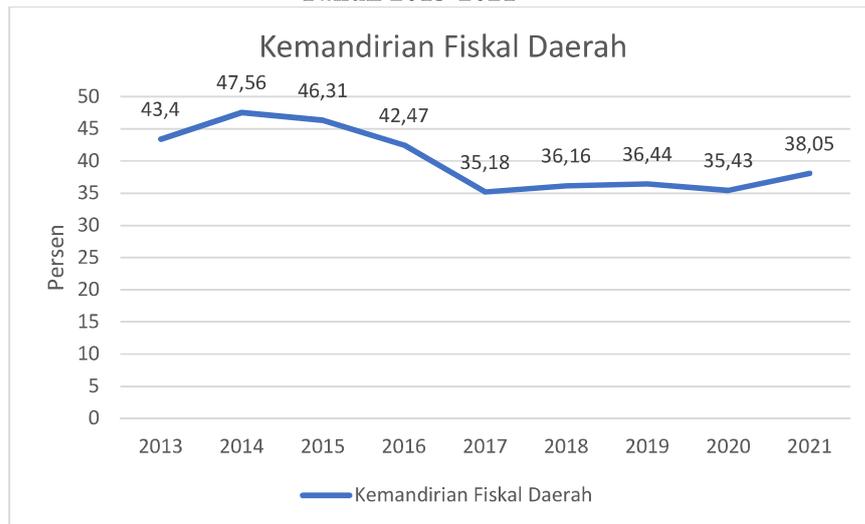
Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 dijelaskan bahwa pajak daerah dan dana perimbangan merupakan sumber penerimaan dari daerah pada masa desentralisasi fiskal. Dengan demikian pemerintah daerah diharap mampu memaksimalkan PAD nya, agar nantinya tercipta kemandirian dari pemerintah daerah yang mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintahan pusat yang terlalu banyak atau mendominasi. Kemandirian pemerintah daerah bisa dicapai melalui pengoptimalan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan PAD lain-lain yang sah yang merupakan substansi dari PAD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 33 tahun 2004 Pasal 6.

Menurut Halim (2012) segala penerimaan yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah seperti penerimaan yang didapat dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan upaya penguatan dan perluasan pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut. Tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dilihat dengan cara membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah.

Dengan kata lain, semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah berarti semakin berhasil suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal. Maka dari itu untuk melihat perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Kab/Kota di Provinsi

Sumatera Barat pada beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada Grafik 1.2:

Grafik 1.2
Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013-2021



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Pada Grafik 1.2 dapat kita lihat bahwa perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami trend yang fluktuatif. Kemandirian fiskal provinsi Sumatera Barat yang terbesar adalah di tahun 2014 yaitu sebesar 47,56% dan yang terendah di tahun 2017 sebesar 35,18%. Namun, persentase kemandirian fiskal ini masih dibawah 50% yang berarti belum cukup baik dimana setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat terus berusaha memaksimalkan pengelolaan sumberdaya daerahnya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan masing-masing daerah masih tergolong rendah

atau dengan kata lain PAD belum menjadi sumber penerimaan terbesar dari masing-masing kabupaten/kota.

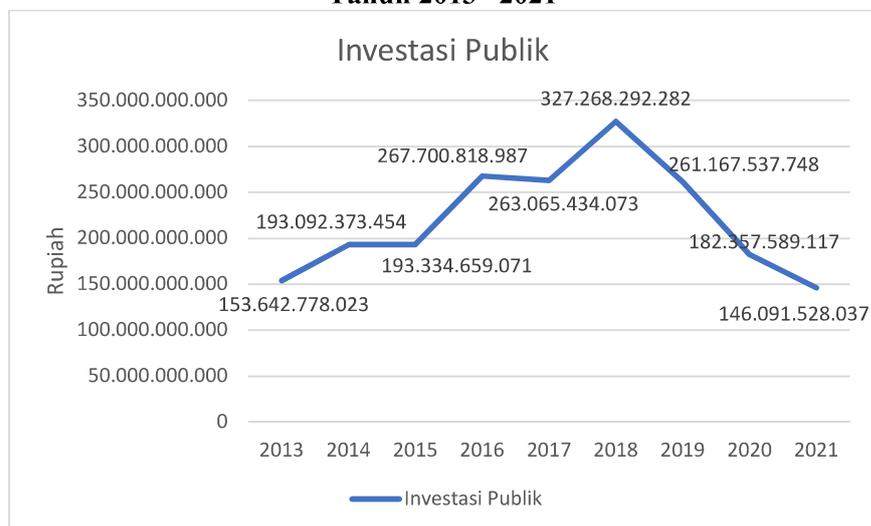
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah bersangkutan. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Struktur PAD yang kuat inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah. Menurut Kusuma (2014), kemampuan PAD dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya membebankan kepada pemerintah. Penerimaan Daerah juga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penerimaan pemerintah pusat. Peningkatan PAD yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada publik sehingga pendapatan perkapita masyarakat juga akan meningkat dengan kata lain daerah dengan pertumbuhan PAD yang positif diharapkan akan meningkatkan pendapatan perkapita.

Selain itu, Laju pertumbuhan PDRB yang selalu meningkat setiap tahunnya juga ditentukan oleh kemampuan investasi yang dapat dilakukan, baik investasi secara agregat maupun investasi pada masing-masing sektor ekonomi. Investasi yang dilakukan itu akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan regional. Investasi secara agregat dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta, besarnya kebutuhan investasi

ini tergantung pula pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dapat disediakan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun non pemerintah dalam pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali harus menerapkan kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat mendorong investasi di sektor swasta (Rian Septiadi, 2021). Investasi dalam sektor publik, dalam hal ini adalah belanja modal, yang merupakan salah satu pengeluaran investasi jangka panjang dalam kegiatan perekonomian. Berikut dapat dilihat pada Grafik 1.3 yaitu data investasi publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui Belanja Modal:

Grafik 1.3
Perkembangan Investasi Publik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013 –2021



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dilihat dari perkembangan investasi yang dilakukan oleh pemerintah di atas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Investasi

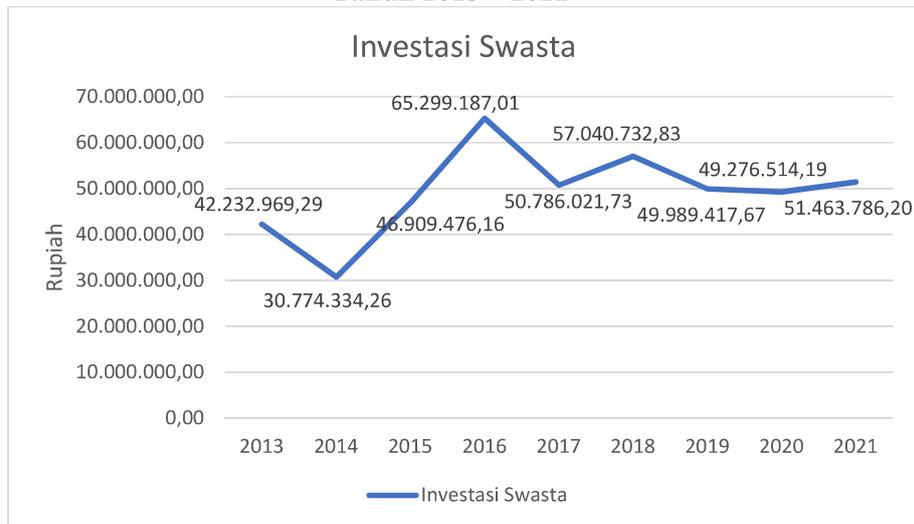
publik yang dikur menggunakan belanja modal di provinsi Sumatera Barat yang terbesar dapat dilihat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.099.701.408.414 dan terendah adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 427.858.382.674. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan terjadinya pandemi covid-19. Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan realisasi proyek tertunda terutama yang berasal dari APBD dan APBN. Belanja modal yang sebagian sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19 juga menyebabkan investasi pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam meningkatkan PDRB diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan keuangan yang memadai, sehingga peran investasi relatif signifikan karena sejalan dengan perannya sebagai penunjang pembangunan dan pertumbuhan nasional. Pembangunan ekonomi harus didukung oleh berbagai faktor diantaranya investasi baik itu swasta maupun pemerintah. Pembangunan yang didukung oleh peningkatan investasi akan mendorong keberlanjutan hasil pembangunan (Mankiw 2007:219). Peningkatan investasi di daerah tidak terlepas dari iklim investasi di daerah. Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, peran pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan. Banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai pembangunan tidak hanya melalui peran pemerintah tetapi juga melalui peran sektor swasta.

Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan tujuan dari investasi tersebut adalah untuk menghasilkan keuntungan (*profit oriented*). Investasi swasta juga menjadi salah satu faktor kunci

untuk memicu peningkatan pendapatan suatu daerah. Karena peningkatan investasi di daerah dapat meningkatkan perkembangan daerah. Investasi swasta merupakan penjumlahan dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Berikut dapat dilihat pada Grafik 1.4:

Grafik 1.4
Perkembangan Investasi Swasta Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013 – 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Grafik 1.4 perkembangan investasi swasta (PMDN dan PMA) di Kab/Kota Provinsi Sumatera barat, dalam kurun waktu 2013 - 2021 investasi yang ditanamkan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Investasi swasta terbesar di Sumatera Barat terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 59.393.962,96 dan yang terendah terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 30.774.334,26. Pada tahun 2020 terjadi penurunan karena pada tahun 2020 terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan investor dalam negeri maupun investor asing mengalami kesulitan untuk berinvestasi dikarenakan tertutupnya akses keluar masuk wilayah maupun negara ke Sumatera Barat. Namun, investasi swasta kembali

meningkat pada tahun 2021 pasca pandemi covid-19 dikarenakan berlakunya masa *new normal* yang memberikan akses kepada investor asing untuk berinvestasi di wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka penulis ingin menunjukkan apakah variabel diatas berpengaruh, maka perlu dilakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **”Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, Dan Investasi Swasta Terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah.

1. Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?
2. Sejauhmana pengaruh Investasi Publik terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?
3. Sejauhmana pengaruh Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?
4. Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal, Investasi Publik, dan Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai disini untuk menganalisis :

1. Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh Investasi Publik terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat.
3. Mengetahui pengaruh Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat.
4. Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, Investasi Publik, dan Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikatakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang penelitian ilmiah dan memberikan gambaran yang jelas bagi penulis tentang Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat

b. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S1 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam menentukan dan merencanakan kebijakan mengenai Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu literatur bagi peneliti lain yang ingin meneliti atau mengembangkan masalah mengenai Otonomi Daerah di Sumatera Barat.